

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KERAJINAN NOKEN MAMA PAPUA DI DISTRIK WANIA, KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH

Nur Asdianti D. Macora¹, Petrus Polyando² & Imelda Hutasoit³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Cilandak-Jakarta, Indonesia
Correspondence Author: antydaeng21@gmail.com

ABSTRACT

Law No. 6/2014 on Villages has provided practical space for a new paradigm in village development in Indonesia. In essence, village community empowerment arises to make the community able to build itself and improve its life because of the existence of a low socio-economic condition, resulting in their inability and ignorance. It is this inability and ignorance of the community that causes their productivity to decline and the poverty rate in the village to increase. This study aims to describe the Policy Implementation of the Noken Mama Papua. Craft Business Empowerment Program in Wania District, Mimika Regency, Central Papua Province. This research uses the theory of policy implementation using Edward III's theory, namely the dimensions of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The data collection techniques used are interviews, observations and document studies. The author uses data analysis techniques with the stages of data reduction, data presentation, verification and conclusion drawing which are arranged tentatively. Based on the research conducted, it is known that the policy implementation of the noken craft business empowerment program has not been implemented properly, especially from the dimensions of human resources, budget resources and equipment resources. Then, related to the dimensions of the organizational structure, there is no SOP for empowering noken craft businesses both in the village government and in the district.

Keyword: *Policy Implementation, Community Empowerment, Noken, Mama Papua*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberi ruang praktik bagi paradigma baru dalam pembangunan desa di Indonesia. Paradigma pembangunan yang dilakukan sendiri oleh Desa dikenal dengan istilah "Desa Membangun" (UU Nomor 6/2014 dalam penjelasan). Paradigma Desa Membangun sudah dipraktikkan oleh desa yang mempunyai *agent of change* terutama pada struktur pemerintah desa. Hal ini karena *agent of change* dapat langsung memberikan masukan ataupun arahan bagi pembangunan desanya (Purbantara, 2019:2). *Agent of change* diperlukan karena dapat langsung memberikan masukan ataupun arahan bagi pembangunan desa untuk pengembangan masyarakat serta memunculkan keberdayaan desa dalam usaha peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakatnya melalui upaya pemberdayaan masyarakat.

Pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat desa muncul untuk membuat masyarakat mampu membangun dirinya sendiri dan memperbaiki kehidupannya karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi yang rendah, sehingga mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan masyarakat inilah yang mengakibatkan produktivitas mereka menurun dan tingkat kemiskinan di desa meningkat.

Dengan ketimpangan dan tingkat kemiskinan yang tinggi di pedesaan maka pemerintah mengadakan program prioritas di bidang pengentasan kemiskinan yaitu pemberdayaan masyarakat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan pemberdayaan masyarakat yang tepat dan pertumbuhan ekonomi yang baik maka pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Kabupaten Mimika yang berada di Provinsi Papua Tengah, kini menempati urutan ke 26 kemiskinan tertinggi dari 29 kabupaten/kota di Papua Tengah dengan presentasi penduduk miskin (PO) di tahun 2020 yakni 14,26 (jumlah penduduk miskin). Fakta menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan pihak swasta belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Mimika.

Berdasarkan data dari lapangan, diketahui bahwa sektor pertambangan merupakan kontributor terbesar terhadap potensi perekonomian Kabupaten Mimika. Dilihat dari sisi pertumbuhannya, tahun 2020 sektor pertambangan mengalami pertumbuhan sebesar 15,84 persen. Sedangkan pada tahun 2019, sektor pertambangan mengalami perlambatan sebesar -44,64 persen. Hal ini dikarenakan produksi dari PT. Freeport Indonesia juga menurun pada tahun tersebut. Selanjut pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 hanya mencapai diangka 2,22 persen hal ini dikarenakan adanya dampak Covid-19. Sedangkan di sektor industri pengolahan menyumbang sebesar 0,21 persen dari keseluruhan perekonomian Kabupaten Mimika dimana pertumbuhan PDRB sektor industri mengalami perlambatan sebesar 0,46 persen pada tahun 2020.

Namun, peneliti lebih mengspesifikasikan lokus penelitian di salah satu distrik yang berada di Kabupaten Mimika yakni Distrik Wania, sebagaimana apa yang menjadi upaya Pemerintah Distrik Wania dalam pemberdayaan masyarakat agar memiliki pendapatan yang meningkat. Penelitian ini mendeskripsikan secara jelas dan runtut proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh para pihak atau aktor yang terlibat, dimana lokusnya yakni Distrik Wania yang merupakan salah satu dari 18 distrik yang ada di Kabupaten Mimika yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2011. Distrik Wania memiliki 7 Kampung/Kelurahan, yaitu Kamoro Jaya, Wonosari Jaya, Inauga, Nawaripi, Kadun Jaya, Mandiri Jaya, dan Mawokauw Jaya. Tentunya, pemberdayaan mama papua pengrajin noken untuk lebih maksimal, Pemerintah distrik berkoordinasi dan mendelegasikan ke masing-masing kampung untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

Beranjak dari permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan diatas ternyata Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Kerajinan Noken Mama Papua belum terimplementasikan dengan baik. Dimana tujuan yang hendak dicapai dari pemberdayaan yaitu membentuk individu/masyarakat menjadi mandiri secara kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik sehingga dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat orang asli papua (OAP) yang dicita-citakan.

Dengan demikian, peneliti memilih tiga kampung sebagai lokasi penelitian (Kampung Wamokauw Jaya, Kampung Kadun Jaya, dan Kampung Nawaripi) di Distrik Wania, didasarkan pada pertimbangan yang mencakup representasi beragam, kesempatan komparatif, dukungan dari pihak terkait, aksesibilitas dan fasilitas, serta relevansi terhadap tujuan penelitian di Distrik Wania, dengan uraian sebagai berikut; 1) Representasi Beragam: Dengan memilih tiga kampung yang berbeda, peneliti dapat mewakili variasi dan keragaman dalam karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di

Distrik Wania. Setiap kampung memiliki ciri khas dan tantangan unik dalam konteks pemberdayaan usaha kerajinan noken Mama Papua, sehingga hasil penelitian akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi di wilayah tersebut; 2) Kesempatan Komparatif: Memilih beberapa kampung sebagai lokasi penelitian memungkinkan peneliti untuk melakukan perbandingan atau analisis komparatif antara kampung-kampung tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan noken di setiap kampung, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya; 3) Dukungan dari Pihak Terkait: Pemilihan kampung-kampung ini didasarkan pada ketersediaan dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, kepala kampung, atau masyarakat setempat. Dukungan ini penting untuk memfasilitasi akses dan kerjasama dalam melakukan wawancara dan penelitian di lapangan; 4) Aksesibilitas dan Fasilitas: Kemungkinan peneliti memilih kampung-kampung ini juga dapat dipengaruhi oleh aksesibilitas geografis dan ketersediaan fasilitas yang mendukung kegiatan penelitian. Jika kampung-kampung ini memiliki akses yang memadai dan fasilitas yang diperlukan, maka penelitian dapat berjalan lebih efisien dan 5) Relevansi Terhadap Tujuan Penelitian: Peneliti mungkin telah merencanakan untuk memfokuskan penelitian pada Distrik Wania, dan pemilihan tiga kampung ini sudah sesuai dengan tujuan dan cakupan penelitian yang telah ditentukan.

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan (Akib, 2008:117).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah “implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Winarno, 2007:101-102).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat (Edward III, 1990:1).

Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugne Bardach melukiskan kerumitan dalam proses implementasi menyatakan pernyataan sebagai berikut: adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan

lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien (Mazmanian, 1983:139).

Dari berbagai defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan diatas, maka George C. Edward III, mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: a) *Comunication*/komunikasi; b) *Resources*/sumber daya; c) *Disposition*/disposisi & d) *Bureaucratic Structure*/struktur birokrasi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edward III dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor diatas, adapun keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi, menurut George C. Edward (dalam Widodo 2018:97) bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa indikator, yaitu: a) Transimisi. Indikator tranmisi Menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implentors*) kebijakan tetapi juga disampikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung; b) Kejelasan. Menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target *group* dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk menyukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien dan c) Konsisten. Diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target *group* dan pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan penjelasan teori diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan harus adanya kejelasan petunjuk dalam implementasi kebijakan dan kejelasan, konsistensi dalam menjalankan sebuah kebijakan maka dengan terpenuhinya ketiga faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Sumber Daya, dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Widodo 2018:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Ditambahkannya lagi bahwa, sumber daya tersebut meliputi: a) Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. George C. Edward III (dalam Widodo 2018:98), menyatakan bahwa: Sumber daya yang paling penting dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staff. Tidak peduli seberapa jelas dan konsisten urutan implementasi dan tidak peduli seberapa akurat mereka ditransmisikan, jika personel tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif; b) Sumber Daya Anggaran. George C. Edward III (dalam Widodo 2010:100), menyatakan dalam kesimpulan studinya: Keterbatasan anggaran dan oposisi masyarakat dapat membatasi perolehan fasilitas yang memadai. Hal inilah yang menjadi batasan kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh pelaksana kepada masyarakat. Menurut George C. Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas serta terbatasnya intensif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan

program implementasi; c) Sumber Daya Peralatan. Menurut George C. Edward III (dalam Widodo, 2018:102) menyatakan: Sumber daya peralatan juga penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin memiliki staff yang cukup, dapat memahami apa yang harus dilakukannya, mungkin memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa bangunan, peralatan, perlengkapan, dan bahkan ruang terbuka hijau yang diperlukan, maka implementasi tidak akan berhasil; d) Sumber Daya Kewenangan. Sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut George C. Edward III (dalam Widodo, 2018:103), menyatakan bahwa: Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, lebih lanjut Edward III menyatakan, bahwa pelaku utama kebijakan harus diberikan wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor-faktor pendukung sumber daya menjadi bagian penting apabila sebuah implementasi ingin tercapai dengan tersedianya pekerja, penjelasan mengenai sebuah kebijakan dijalankan, kewenangan yang dimiliki dan kelengkapan sarana dan prasaran menjadi faktor dari sumber daya dalam mencapai implementasi kebijakan dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

3. Disposisi dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, (dalam Agustino 2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: a) Pengangkatan Birokrasi. Pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat; b) Intensif. Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi intensif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan diri sendiri, maka memanipulasi intensif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam mendukung *dispositions* dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalankan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik yang baik.
4. Struktur Birokrasi, keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yaitu dua karakteristik utama birokrasi adalah *prosedures operasi standar* (SOP) dan *fragmentasi*. Struktur birokrasi adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi dan adanya *standard operating procesures* (SOP) dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan implemementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab (*fragmentation*) atas kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan penjelasan diatas, mengenai faktor-faktor *Bureaucratic structure* yang mendukung dalam suksesnya sebuah implementasi kebijakan harus adanya prosedur tetap bagi pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakannya dan adanya tanggung jawab dalam menjalankan sebuah kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya (Hadari, 2012:630). Oleh karena itu, dalam rangka mendapatkan data lapangan peneliti harus terjun langsung ke lapangan agar dapat mengamati secara langsung keadaan masyarakat yang diteliti. Selanjutnya dalam kaitan penelitian ini berarti peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kerajinan Noken Mama Papua yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desain penelitian ini bersifat kualitatif yang memfokuskan pada sebuah peristiwa yang berangkat dari kesadaran dan pengalaman manusia. Pendekatan ini mengungkapkan makna dan konteks perilaku individu, dan proses yang terjadi dalam pola amatan dari faktor yang berhubungan. Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa lisan, tulisan maupun dari sikap dan perilaku orang yang diamati (Moleong, 2000:4).

PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha kerajinan noken di Distrik Wania. Terdapat beberapa indikator komunikasi yang relevan dalam implementasi kebijakan tersebut, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar informasi dan tujuan kebijakan harus ditransmisikan dengan jelas kepada kelompok sasaran (mama Papua sebagai pengrajin noken). Masing-masing kampung memiliki gaya komunikasi yang berbeda, dan perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dari pihak Pemerintah Distrik kepada kampung-kampung terkait implementasi kebijakan bahkan Pemerintah Kampung ke pelaku usaha anyam noken.

Dilihat dari indikator transmisi bahwa pesan atau informasi dari Pemerintah terkait pemberdayaan Pengrajin noken belum semaksimal mungkin dilaksanakan dimasing-masing kampung setempat. Kemudian dari indikator kejelasan terlihat bahwa perlu adanya upaya dalam meningkatkan kejelasan informasi, agar semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang langkah-langkah yang harus diambil. Sedangkan dari indikator konsisten menunjukkan perbedaan dalam pemahaman dan penerapan kebijakan.

Komunikasi yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahan harus memperhatikan dari aspek kearifan lokal Orang Asli Papua (OAP) terkait pemberdayaan usaha kerajinan noken di Distrik Wania. Terkadang yang menjadi kendala dan penghambat proses komunikasi itu malah datangnya dari kita atau komunitas luar, yang masih lemah pemahaman terhadap komunitas lokal/masyarakat setempat, serta masih kurang mengerti ilmu komunikasi yang efektif ketika berhadapan dengan masyarakat papua. Oleh sebab itu, harus dilakukan pendekatan secara *persuasive* dari Pemerintah dan masyarakat khusus mama papua pengrajin noken serta dapat menunjukkan rasa empati yang tinggi dengan memperhatikan budaya dan struktur sosial di masing-masing kampung, serta melibatkan pertemuan komunitas media lokal.

Sumber Daya

Implementasi kebijakan pemberdayaan usaha kerajinan noken dihadapkan pada perbedaan tingkat pendidikan dan kapasitas pemerintah kampung di masing-masing kampung. Hal ini mempengaruhi kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia serta sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan mama Papua pengrajin noken.

Dilihat dari indikator sumber daya manusia yang terjadi pada ketiga kampung tersebut, Kampung Mawokauw Jaya memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup baik. Sedangkan kedua kampung lainnya yaitu Kadun Jaya dan Nawaripi menunjukkan adanya kekurangan dalam pengelolaan sumber daya manusia khususnya program pemberdayaan usaha kerajinan noken mama Papua. Selanjutnya, indikator sumber daya anggaran dan peralatan, masih dalam tahap kurang maksimal khususnya dalam mengambil langkah-langkah konkrit. Serta indikator sumber daya kewenangan yang memiliki pembagian wewenang yang belum maksimal sehingga menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan usaha anyam noken ini.

Usaha anyam noken ini menjadi salah satu mata pencaharian mama Papua untuk membantu memenuhi keperluan rumah tangga, sehingga harus menjadi perhatian Pemerintah Kampung maupun Pemerintah Distrik, untuk segera dilakukan pengembangan usaha noken ini dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat. yang dapat dilakukan dengan mengakui dan menghargai sumber daya manusia yang ada di setiap kampung seperti, memanfaatkan keahlian dan keterampilan khas yang dimiliki oleh mama Papua sebagai perajin noken, membangun semangat gotong-royong dan kerjasama antarperajin noken serta pihak terkait untuk saling mendukung dalam pengelolaan program, melakukan sosialisasi program pemberdayaan dengan berbasis budaya lokal dan menggunakan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan masyarakat setempat, melibatkan Pemerintah Kampung dan Pemerintah Distrik dalam dialog terbuka untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pembagian wewenang terkait program pemberdayaan, serta menyelenggarakan pelatihan dan *workshop* dengan pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal dan bahasa setempat.

Disposisi

Disposisi atau sikap yang dimiliki oleh *implementor* (pemerintah atau pihak yang bertugas melaksanakan kebijakan) berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam indikator pengangkatan birokrasi ditemukan bahwa Kampung Mawokauw Jaya memiliki komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan usaha kerajinan noken, terbukti dengan terbentuknya kelompok anyam noken dan adanya surat keputusan kepala kampung terkait pembentukan kelompok anyam noken meskipun dari segi fasilitas keperluan kelompok anyam noken belum semaksimal mungkin. Namun, di Kampung Kadun Jaya, pengangkatan birokrasi untuk melaksanakan kebijakan belum sepenuhnya terbentuk. Sedangkan, di Kampung Nawaripi bahwa pemerintahnya telah menginisiasikan pembentukan kelompok anyam noken. Akan tetapi, pemberdayaan dan dukungan fasilitasnya belum dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator pemberian intensif dari ketiga kampung tersebut belum direalisasikan. Sehingga menyebabkan kelompok usaha kerajinan noken ini menggunakan dana pribadi dalam menjalankan usaha kerajinan tersebut.

Dalam hal ini, pendekatan kearifan lokal sangat diperlukan agar pengimplemetasian usaha kerajinan noken dapat dikatakan berhasil, tentu saja dengan memperhatikan kapasitas lokal disetiap

kampung untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi kebijakan, tentunya dengan mendorong dialog terbuka antara *implementor* (pemerintah atau pihak yang bertugas), kepala adat, dan masyarakat setempat di setiap kampung untuk merencanakan langkah-langkah konkrit dalam memfasilitasi kelompok usaha kerajinan noken, serta mengintegrasikan mekanisme intensif sebagai bagian dari kebijakan pemberdayaan untuk memotivasi kelompok dan meningkatkan kesejahteraan.

Struktur Organisasi

Dari hasil data yang dikelola ditemukan bahwa belum terbentuknya *Standard Operational Procedure* (SOP) terkait kebijakan pemberdayaan usaha kerajinan noken. Untuk itu, struktur organisasi perlu diperkuat dan dikelola dengan baik untuk mendukung implementasi pemberdayaan kelompok anyam noken. Dari hasil penelitian diatas, peneliti memverifikasi bahwa indikator *Standard Operational Procedure* (SOP) masing-masing kampung mempunyai kecenderungan berbeda, hal ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kampung tersebut. Namun, saat ini belum ada SOP yang secara khusus terkait dengan pemberdayaan pengrajin noken. Ini berarti bahwa prosedur dan panduan yang terperinci untuk mendukung perajin noken dalam pengembangan keterampilan mereka atau pengembangan usaha mama papua belum ada.

Selanjutnya indikator fragmentasi dalam struktur birokrasi dapat terjadi ketika ada pembagian tugas dan wewenang yang tidak jelas atau berlebihan. Dalam konteks pemberdayaan mama papua pengrajin noken, data menunjukkan bahwa Kampung Mawokauw Jaya telah membentuk struktur organisasi kelompok anyam noken dengan keputusan kepala kampung yang mendukung. Namun, Kampung Kadun Jaya dan Kampung Nawaripi belum menunjukkan adanya keputusan resmi terkait pembentukan kelompok anyam noken dan pemberdayaan.

Hal-hal seperti itu, harusnya memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat papua dengan cara mendorong partisipasi aktif Orang Asli Papua (OAP), kepala adat, dan mama papua dalam merancang dan mengelola struktur organisasi terkait pemberdayaan usaha kerajinan noken, dalam proses pengambilan keputusan terkait pembentukan SOP, untuk memastikan relevansi dan keefektifan dalam konteks budaya dan lingkungan lokal.

Fenomena tersebut yang menunjukkan kompleksitas persoalan dalam mengimplementasikan kebijakan itu tidak cukup digunakan sebagai apologi atau alasan pemaaf ketika kebijakan publik sulit diimplementasikan. Pada dasarnya semua kebijakan publik memang sulit diimplementasikan dalam arti hingga mencapai tingkat keberhasilan yang optimal. Ada saja sejumlah kekurangan dan keterbatasan yang bisa diraih, meskipun sudah mengerahkan sejumlah sumber daya dan kapasitas yang dimiliki organisasi. Implementasi kebijakan publik sebagai sebuah proses kegiatan yang kompleks dan karenanya sulit dilakukan, tetapi fakta demikian tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melakukannya secara optimal.

PENUTUP

Dari hasil riset tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik, khususnya kebijakan pemberdayaan usaha kerajinan noken, adalah proses yang kompleks dan belum optimal dilakukan. Dari beberapa dimensi yang ada, secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik, terutama

dari dimensi sumber daya yakni kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia serta sumber daya anggaran dan peralatan, menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang dialokasikan untuk pemberdayaan mama Papua sebagai perajin noken menjadi perhatian. Kemudian, terkait dimensi struktur organisasi yakni belum terbentuknya SOP pemberdayaan usaha kerajinan noken baik Di Pemerintah Kampung maupun Di Distrik.

Selanjutnya, untuk dimensi disposisi Kampung Kadun Jaya dan Nawaripi, belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan. Sedangkan, untuk dimensi komunikasi, informasi dari Pemerintah terkait pemberdayaan pengrajin noken belum semaksimal mungkin dilaksanakan di masing-masing kampung setempat, sehingga perlu adanya upaya dalam meningkatkan kejelasan informasi dalam pemahaman dan penerapan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Agustiono. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*. Jakarta: Rajawali Press.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya Jurnal Baca Volume 1 Agustus*. Makassar: Universitas PEPABARI Makassar.
- Alfitri. 2011. *Community Development Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asti, Iriani Amir. 2022. *Pemberdayaan Perajin Noken Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm Di Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua*.
- Ayuningtyas, Dumilah Dr. 2014. *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Cresswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edward III, George C (edited). 1990. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al.
- Fitriyanti, N. (2022). *Implementation Of Government Regulations In The Imtlemntationof Child Protection In Rokan Hilir Regency Of Indonesia*.
- Lamalewa, Funnisia. 2020. *Peranan Inovasi Dalam Peningkatan Kinerja Usaha Kain Batik Papua Pada Sanggar Waninggapnanggo Di Merauke*. 01(1), 1-23. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, Vol IX, No. 1
- Hadari, Nawawi. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.

- Irmayanti. 2020. *Jenis-Jenis Pemberdayaan Dan Pengorganisasian Masyarakat*. Jakarta
- Laksmiana, Yusak. 2010. *Jelajah Jayapura: Ekosistem Alam Budaya Di Pintu Gerbang Papua*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mardikanto, Totok, Soebiantodan Poerwoko. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin E.Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Nuvola, Gloria, Harto Syafri. 2012. *Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Meresmikan Noken Sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2012*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 1(1).
- Pahri. 2017. *Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Papua Melalui Majelis Rakyat Papua*. Tesis.
- Purbantara, Arief dan Mujianto. 2019. *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani. 2022. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Bandung: Jurnal Publik.
- Sawir, M., Laili, I., Qomarrullah, R., & Wulandari S, L. (2021). *Pemberdayaan Local Wisdom Usaha Kerajinan Noken Papua Berbasis Digital Di Kelurahan Ardipura Jayapura Selatan*. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 7(1).
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. 2018. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. 2005. Bandung: Refika Aditama.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama
- Sutardi, A. Endang Budiasih. 2010. *Mahasiswa Tidak Memble Siap Ambil Ahli Kekuasaan Nasional*. Jakarta : PT. Eles Media Komputindo Kompas Gramedia, Anggota IKAPI.
- Sutarto dan Sucipto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Untuk Meningkatkan Kecakapan Hidup Melalui Kursus Menjahit Di Lkp Elisa Tegal*. Jakarta: Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

- Suryana. 2016. *Kewirausahaan; Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Abdul Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Walianggen Yos, Rumatora Alexander. 2016. *Rekonstruksi Etnoteknologi Noken Kulit Pohon Oleh Suku Yali di Kampung Hubakma Kabupaten Yalimo*. Jurnal Kehutanan Papua.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3.
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia. Zonggonau, Arief S., Yuyun P. Rahayu dan Marcus R. Maspaitell. 2021.
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Mimika. *Statistik Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2021*. <https://mimikakab.bps.go.id/>.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Sistem Database Desa dan Kelurahan (Distrik Wania Tahun 2020)*. Kabupaten Mimika. <https://mimikakab.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Survei Sosial Ekonomi Nasional Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mimika*. <https://www.bps.go.id/>
- Zainal, Z., & Putra, R. N. (2022). Implementation of Update Voter Data on Election of Governor and Vice Governor of Riau in Bengkalis Regency. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 8(2), 1-15.